

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pasca keruntuhan Romawi Barat oleh adanya serangan Kaisar Odoacer (430-493 M) tahun 476 M, Eropa menjadi sebuah wilayah yang terpecah-pecah dan dikuasai beberapa suku bangsa dari Jerman seperti Vandal, Ostogroth dan Franka. Satu-satunya kuasa yang dipegang Roma adalah Negara Gereja. Namun sekitar empat ratus tahun kemudian, terjadi semacam pemugaran atas puing-puing Imperium Romawi yang dipersatukan di bawah kekuasaan Kerajaan Franka, yaitu pada masa Raja Charlemagne atau Karel Agung. Nama-nama lainnya adalah Karl der Grosse atau Karolus Magnus, raja bangsa Frank 768-814 (Poesponegoro, 1988: 64). Maka atas dasar usahanya tersebut, ia ditasbihkan sebagai pewaris sah Kekaisaran Romawi oleh Gereja Roma, sekaligus ditasbihkan sebagai raja yang dipilih menjadi wakil Tuhan di bumi.

Dalam percaturan dunia kuno, selalu terdapat apa yang dinamakan dengan konsep *Dewa Raja*. Seorang raja adalah manusia yang memegang mandat sekaligus wakil kuasa Tuhan atau dewa di muka bumi. Setidaknya, pengangkatan seorang raja harus direstui oleh pihak pemuka agama. Maka tak jarang sebuah negara menjadi “negara agama” atau sebaliknya sebuah agama menjadi “agama negara”. Tidak terkecuali apa yang terjadi pada Kekaisaran Romawi.

Kaisar Commodus, yang hidup pada tahun 180-192 M, adalah yang pertama-tama menerima agama Katolik dan memperbolehkan para penganutnya berada di sekitarnya (Ridwan dan Sodik, 2010: 76). Tokoh lain yang paling masyhur dalam sejarah, yang dianggap berjasa dalam perkembangan Katolik, adalah Kaisar Constantine Yang Agung (280-337 M). Ia adalah seorang kaisar yang telah menjadikan Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi, di bawah pemerintahannya, Romawi menjadi Kerajaan Katolik yang tidak memisahkan agama dari politik.

Bahkan ratusan tahun setelah Kaisar Constantine wafat, ide tentang perlu adanya sebuah pemerintahan Tuhan di bumi (Kekaisaran Katolik) masih terus

dilaksanakan. Ide ini juga terus membekas dan menjelma sebagai “ciri khas” kehidupan Eropa sepanjang Abad Pertengahan, di mana pemerintahan sipil (para raja) harus memerintah rakyatnya atas dasar legitimasi gereja. Gereja dan negara adalah dua hal yang seolah ditakdirkan untuk bersatu tanpa mampu untuk dipisahkan. Seperti dikemukakan dalam buku *History of Western Europe* berikut:

Characteristic of the theory of the Middle Ages according to which the civil government and the Church went hand in hand in ordering and governing the life of the people. Defection from the Church was regarded by the state as quite as serious a crime as treason against itself. While the claims of the two institutions sometimes conflicted, there was no question in the minds either of the king's officials or of the clergy that both the civil and ecclesiastical government were absolutely necessary; neither class ever dreamed that they could get along without the other (Robinson, 1903: 81).

(Ciri khas dari ajaran Abad Pertengahan berdasarkan kepada pola pemerintahan sipil dan Gereja yang saling bekerjasama dalam memerintah dan mengatur kehidupan rakyat. Pembelotan yang dilakukan Gereja dianggap oleh negara sebagai kejahatan serius layaknya sebuah pengkhianatan terhadap negara itu sendiri. Meskipun klaim dari dua lembaga tersebut terkadang bertentangan, tidak ada keraguan di benak salah satu di antara pejabat raja maupun pendeta bahwa pemerintahan sipil dan gereja keduanya sangat diperlukan; tak ada golongan yang beranggapan bahwa mereka bisa hidup tanpa yang lain)

Pada saat itu, semua orang menganggap bahwa raja dan gereja adalah sebuah kekuasaan yang sama tinggi. Meskipun mereka sepakat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah Tuhan, hanya saja dalam aplikasinya di dunia, siapakah yang akan mewakili-Nya. Dalam buku *100 Peristiwa Penting dalam Sejarah Kristen* dikemukakan sebagai berikut:

Ketika Konstantinus bertobat dan membawa agama Kristen ke kerajaan sebagai agama yang disenangi, terjalinlah hubungan (kerajaan) dengan gereja. Bahkan setelah kerajaan itu jatuh, banyak kalangan berpegang pada ide bahwa seharusnya ada kekaisaran Kristen. Namun siapa yang seharusnya memimpin? Apakah pemimpin spiritual, Sri Paus, apakah kuasa itu harus ada di tangan seorang raja? (Curtis dkk, 1999: 46).

Ide dan pertanyaan tersebut dijawab oleh Gereja Roma atau oleh Paus dengan sebuah tindakan yang nyata. Pada hari Natal tanggal 25 Desember 800 M,

Paus Leo III mengenakan mahkota di atas kepala Charlemagne dan secara seremonial mengumumkan bahwa Charlemagne merupakan Kaisar Romawi yang dipilih Tuhan. Ini berarti Kerajaan Franka selain menjadi kerajaan secara politis, juga menjadi kerajaan secara agama atas legitimasi Gereja Roma. Kekaisaran Romawi Barat yang sudah hancur tiga abad sebelumnya dinyatakan bangkit kembali dan Charlemagne merupakan pengganti Agustus Caesar yang sah (Hart, 1989: 430). Oleh adanya legitimasi tersebut Charlemagne juga dianggap sebagai peletak dasar *The Holy Roman Empire* (Kekaisaran Romawi Suci), sebuah kerajaan yang merepresentasikan diri dari sebuah persilangan antara negara dengan konfederasi keagamaan, yang berlangsung lama hingga abad ke-19 (Hart, 1989: 433).

Pada saat ia ditasbihkan sebagai pewaris Kekaisaran Romawi, dan dilegitimasi sebagai kerajaan kekristenan, muncul sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah mengapa Gereja Roma menasbihkan dan melegitimasi seorang raja yang bukan keturunan atau bangsa Romawi? Seperti diketahui bahwa Charlemagne bukanlah orang Romawi dilihat dari aspek kelahiran, pemikiran dan budayanya. Charlemagne tergolong etnis Teotonik dengan bahasa aslinya berdialek Jerman Kuno. Ibu kota kekaisarannya pun bukan di Roma melainkan di kota Aachen Jerman. Ia menghabiskan sebagian besar umurnya untuk hidup di Eropa Utara, khususnya di Jerman dan hanya beberapa kali saja ia melakukan perjalanan ke Roma, yang pernah menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi.

Kemudian tentang Kerajaan Franka yang dianggap sebagai “pemugaran” Kekaisaran Romawi juga menjadi sebuah keganjilan. Karena daerah yang dikuasainya sangatlah berbeda. Betapapun luasnya kekuasaan Charlemagne, hanya mencakup setengah dari Kekaisaran Romawi. Hanya sebagian daerah yang sama dikuasai, seperti Belgia, Prancis, Swiss dan bagian utara Italia. Tapi Inggris, Spanyol, Italia Selatan, dan Afrika Utara yang merupakan Kekaisaran Romawi tidak berada dalam kekuasaan Charlemagne. Sebaliknya, Jerman yang merupakan daerah taklukan Charlemagne, bukan bagian dari wilayah Kekaisaran Romawi.

Mengapa pula gereja tidak memberikan legitimasinya tersebut kepada Kekaisaran Byzantium yang jelas-jelas merupakan keturunan dan bagian dari perjalanan sejarah Kekaisaran Romawi? Mungkinkah gereja telah terjebak dalam manuver politik dan strategi Charlemagne dalam meraup kekuasaan di dataran Eropa, sehingga Charlemagne bisa menjadi penguasa tunggal bagi umat Katolik? Atau justru sebaliknya, Gereja Roma hendak menggunakan Charlemagne sebagai alat kekuasaan yang tunduk sepenuhnya kepada Paus? Yang jelas legitimasi terhadap Charlemagne dipandang sebagai sesuatu yang tidak berdasar. Seperti yang digambarkan dalam buku *A History of Western World* sebagai berikut:

...for the ceremony of christmas day 800 there was no legal justification inasmuch as the eastern emperor considered himself the rightful ruler of the west. but on the basis of power there was complete justification (Lyon dkk, 1972: 114).

(...untuk upacara pada hari natal tahun 800 itu tidak ada pembenaran sumber hukumnya, karena Kaisar Romawi Timur dianggap sebagai penguasa yang sah dari Barat. Tapi atas dasar kekuasaan, hal itu menjadi penuh pembenaran)

Menurut kutipan di atas, sebenarnya penyerahan gelar itu tidak ada dasar hukumnya. Tetapi jika itu dilakukan atas dasar sebuah kekuasaan dan manuver politik maka hal itu dapat dijadikan suatu pembenaran. Maka adalah hal yang wajar jika Charlemagne semakin bersengketa dengan Kekaisaran Byzantium. Kedudukannya dalam bahaya selama ia tidak diakui sebagai raja oleh Kaisar Roma di Konstantinopel, yang haknya atas jabatan tersebut tidak bisa dibantah (Toynbee, 2007:525). Meskipun masalah penyerahan tahta Romawi tersebut bukan satu-satunya faktor sengketa Charlemagne dengan Kekaisaran Byzantium, sengketa wilayah juga bisa jadi kemungkinan faktor lain adanya sengketa tersebut.

Sengketanya dengan Kekaisaran Byzantium tersebut membuat Charlemagne melakukan kolaborasi dengan pihak yang dianggap seteru Kekaisaran Byzantium, yang tiada lain adalah Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Charlemagne melakukan apa yang dilakukan oleh sang ayah, yaitu Raja Peppin le Bref (715-768 M), yang pernah melakukan kolaborasi dengan dengan Ja'far Al-Manshur (wafat 774 M) Khalifah Abbasiyah. Charlemagne sendiri berkolaborasi dengan

Agung Purnama, 2014

KONFRONTASI DAN KOLABORASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Khalifah Harun Ar-Rasyid (763-809 M). Terjalinlah hubungan yang baik di antara khalifah-khalifah tersebut dengan raja-raja Eropa sejaman; diantara Khalifah Al-Manshur dan Peppin, di antara Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Charlemagne, mereka bertukar hadiah dan pemberian serta duta-duta (Syalabi, 2008: 177-178).

Charlemagne hendak menggunakan “jasa” sekutunya tersebut untuk menggrogoti Kekaisaran Byzantium. Sebagai balasannya, Charlemagne memerangi Kekhalifahan Umayyah II di Spanyol, apalagi memang sebelumnya dia memiliki ambisi untuk menguasai wilayah Semenanjung Iberia tersebut. Seperti diketahui, Kekhalifahan Umayyah II adalah seteru dari Kekhalifahan Abbasiyah sekaligus sekutu dari Kekaisaran Byzantium. Semakin mantaplah langkah politik Raja Franka tersebut, seolah ia mengerti pribahasa sambil menyelam minum air. Seperti yang dikemukakan dalam buku *Islam: Konsep dan Sejarahnya* sebagai berikut:

Kedua Raja besar itu telah mengadakan hubungan persahabatan yang didorong oleh kepentingan masing-masing. Charlemagne memperkuat Harun sebagai orang yang memiliki kemungkinan menjadi sekutunya dalam menghadapi Bizantium, yang juga bermusuhan dengan Harun. Harun menginginkan persahabatan dengan Charlemagne untuk menghadapi persaingan dan musuhnya yang sangat berbahaya, yaitu para penguasa Bani Umayyah di Spanyol yang juga bersahabat dengan Charles (Mahmudunnasir, 2005: 220).

Sampai pada akhirnya di antara empat kekuasaan tersebut, memunculkan pola siapa kawan dan siapa lawan. Bagi siapa yang dianggap lawan maka akan ditunjukkan sikap konfrontasi dan siapa yang dianggap kawan maka ditunjukkan sikap kolaborasi. Sikap kolaborasi ini diwujudkan melalui interaksi hubungan diplomatik atas dasar kepentingan yang sama, terlebih dapat menguntungkan satu sama lain. Maka perasaan persahabatan yang berbalas-balasan ini dinyatakan dengan pertukaran-pertukaran duta-duta dan hadiah-hadiah (Hitti, TT: 110).

Pertanyaannya adalah keuntungan apa yang didapat Charlemagne dari koalisinya dengan Kekhalifahan Abbasiyah? apakah hanya sebatas untuk mendapatkan hadiah? Karena walaupun ia berkonfrontasi dengan Kekhalifahan Umayyah II, itu tidak serta merta hanya dilandasi oleh rasa persahabatannya

Agung Purnama, 2014

KONFRONTASI DAN KOLABORASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan Harun Ar-Rasyid, melainkan memang sudah menjadi kepentingannya dalam membendung kekuatan orang-orang muslim, terlebih kepentingannya menguasai Spanyol. Kemudian ketika sekutunya tersebut (Harun Ar-Rasyid) melakukan konfrontasi terhadap Kekaisaran Byzantium, apa pula keuntungan yang bisa didapat Charlemagne? sejauh mana konfrontasi tersebut dapat menjadikan Charlemagne sebagai satu-satunya penguasa tunggal di Eropa dan satu-satunya penguasa bagi orang-orang Katolik?.

Segala tindak tanduk Charlemagne mulai dari konfrontasi dengan Kekaisaran Byzantium, sikap politiknya terhadap Gereja Roma, Konfrontasinya terhadap Kekhalifahan Umayyah II di Spanyol, serta kolaborasinya dengan Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad adalah serangkaian bentuk politik luar negeri Charlemagne yang mengundang banyak pertanyaan sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Apalagi seputar kolaborasi yang terjadi di antara kerajaan Katolik dengan kekhalifahan Islam (dalam hal ini Kerajaan Franka dengan Kekhalifahan Abbasiyah, Kekhalifahan Umayyah II dengan Kekaisaran Byzantium) masih sedikit dituliskan oleh para sejarawan Islam. Ahli-ahli sejarah Islam sama sekali tidak membicarakan hubungan diplomatik ini dan semua informasi tentang hal ini diperoleh dari sumber-sumber Kristen (Mahmudunnasir, 2005: 220). Hal serupa diungkapkan oleh Phillip K. Hitti sebagai berikut:

Yang mengherankan dalam peristiwa pertukaran para duta-duta dan hadiah-hadiah ini adalah bahwa penulis-penulis Muslim sama sekali tidak ada menulis apa-apa tentang itu. Sungguhpun mereka menyebut beberapa kejadian yang berhubungan dengan pertukaran-pertukaran diplomatik dan persahabatan, namun pertukaran-pertukaran itu sendiri tidak digugat oleh mereka (Hitti, TT:110-111).

Selain itu, literatur kajian terhadap judul ataupun tema yang sejenis dengan judul yang diangkat oleh peneliti di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI sampai sekarang belum ada yang menulisnya, sehingga hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi hal yang baru dan dapat memperkaya kajian sejarah Eropa dan sejarah Islam era klasik atau masa Abad Pertengahan di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.

Agung Purnama, 2014

KONFRONTASI DAN KOLABORASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan diatas, peneliti bermaksud mengkaji serta menuangkannya kedalam sebuah tulisan skripsi yang berjudul “*KONFRONTASI DAN KOLABORASI: Studi Tentang Politik Luar Negeri Raja Charlemagne Terhadap Kekaisaran Byzantium dan Kekhalifahan Umayyah II 772-814 M*”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan utama yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana politik luar negeri Charlemagne terhadap Kekaisaran Byzantium dan Kekhalifahan Umayyah II 772-814 M.

Untuk lebih memfokuskan kajian penelitian, peneliti merumuskan permasalahan ke dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Raja Charlemagne?
2. Bagaimana manuver politik Charlemagne sehingga Gereja Roma memberikan legitimasi sebagai “Kaisar Romawi” kepada Charlemagne, tidak kepada Kekaisaran Byzantium?
3. Bagaimana bentuk konfrontasi Charlemagne terhadap Kekhalifahan Umayyah II yang menjadi sekutu Kekaisaran Byzantium?
4. Bagaimana bentuk kolaborasi Charlemagne dengan Kekhalifahan Abbasiyah dalam upaya menghadapi Kekaisaran Byzantium dan Kekhalifahan Umayyah II?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan latar belakang kehidupan Raja Charlemagne, yang meliputi kehidupan pribadi Raja Charlemagne dan keadaan Kerajaan Franka serta sosial politik Eropa menjelang Charlemagne.
2. Mendeskripsikan manuver politik Charlemagne sehingga Gereja Roma memberikan legitimasi sebagai “Kaisar Romawi” kepada Charlemagne, tidak kepada Kekaisaran Byzantium.

Agung Purnama, 2014

KONFRONTASI DAN KOLABORASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Menguraikan bentuk konfrontasi Charlemagne terhadap Kekhalifahan Umayyah II yang menjadi sekutu Kekaisaran Byzantium.
4. Menguraikan bentuk kolaborasi Charlemagne dengan Kekhalifahan Abbasiyah dalam upaya menghadapi Kekaisaran Byzantium dan Kekhalifahan Umayyah II.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Memperkaya penulisan sejarah dalam rangka mengembangkan wawasan pengetahuan mengenai sejarah Eropa dan sejarah peradaban Islam.
2. Memberikan gambaran mengenai dinamika politik dunia Abad Pertengahan pada sekitar abad ke-7, ke-8 dan ke-9 Masehi.
3. Memberikan kesadaran bahwa dalam politik akan selalu terjadi benturan meskipun bagi penganut ideologi atau kepercayaan yang sama, karena yang dikedepankan dalam politik adalah masalah kepentingan.
4. Dapat menjadi acuan untuk penelitian dalam lingkup yang lebih luas dan mendalam.
5. Dapat dijadikan materi kajian bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah yang mengontrak mata kuliah Sejarah Peradaban Barat dan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam.
6. Dapat dijadikan materi pembelajaran sejarah SMA kelas X pada Standar Kompetensi menganalisis peradaban Indonesia dan dunia.
7. Dapat dijadikan materi pembelajaran di sekolah-sekolah berbasis agama Islam (Madrasah), pada mata pelajaran Sejarah Peradaban Islam.
8. Mempunyai manfaat tersendiri bagi penulis dalam pengembangan nalar dan intelektual.

1.5 METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

Dalam mengkaji permasalahan *KONFRONTASI DAN KOLABORASI: Studi Tentang Politik Luar Negeri Raja Charlemagne Terhadap Kekaisaran Byzantium dan Kekhalifahan Umayyah II 772-814 M* ini, peneliti akan menggunakan suatu metode historis. Menurut Gottschalk (1985:32) metode sejarah adalah proses

menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses yang disebut historiografi. Dengan mengacu pada pendapat Gray (Sjamsuddin, 2007: 69) bahwa langkah-langkah penelitian sejarah adalah sebagai berikut:

- a. Memilih suatu topik
- b. Mengusut semua evidensi (bukti) yang sesuai dengan topik
- c. Membuat catatan yang dianggap penting dan relevan dengan topik
- d. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah berhasil dikumpulkan (kritik sumber)
- e. Menyusun hasil penelitian
- f. Menyajikan dan mengkomunikasikan kepada pembaca dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian, sehingga dapat dimengerti.

Dari keenam langkah metode penelitian tersebut, dikatakan bahwa a, b dan c termasuk langkah-langkah dalam *heuristik*, butir d termasuk *kritik sumber*, sedangkan butir e dan f termasuk langkah-langkah *penulisan* dan *interpretasi sejarah* (historiografi). Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam upaya mengumpulkan informasi tentang penulisan skripsi ini, penulis melakukan teknik Studi literatur. Teknik ini dilakukan oleh penulis dengan membaca dan menganalisis berbagai sumber yang relevan dengan topik yang akan diteliti, melalui pengungkajian sumber-sumber dari berbagai buku.

1.6 STRUKTUR ORGANISASI SKRIPSI

Penyusunan skripsi ini dijabarkan dalam struktur organisasi skripsi sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang di dalamnya memaparkan gambaran dasar penelitian. Meliputi latar belakang masalah, yang didalamnya berisi penjelasan mengapa masalah tersebut diteliti, serta mengenai alasan pemilihan masalah tersebut sebagai judul. Pada bab ini juga terdapat rumusan masalah, yang disajikan dalam bentuk pertanyaan untuk memfokuskan penelitian. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode serta teknik penelitian dan struktur organisasi skripsi juga berada dalam koridor bab ini.

Agung Purnama, 2014

KONFRONTASI DAN KOLABORASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bab II kajian pustaka yang merupakan studi kepustakaan dan landasan teoritis dari berbagai referensi dan sumber literatur yang digunakan untuk membantu penulis dalam menganalisis dan menguraikan penulisan skripsi yang berjudul “*KONFRONTASI DAN KOLABORASI: Studi Tentang Politik Luar Negeri Raja Charlemagne Terhadap Kekaisaran Byzantium dan Kekhalifahan Umayyah II 772-814 M*”.

Bab III metode penelitian yang memaparkan tentang langkah-langkah, metode dan teknik penelitian dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber, analisis dan cara penulisannya. Dengan langkah penelitian yang dimulai dari Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Semua prosedur dan rangkaian kegiatan penelitian, mulai tahap persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian dan penulisan penelitian akan dijabarkan pada bab ini.

Bab IV hasil penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang *Politik Luar Negeri Raja Charlemagne Terhadap Kekaisaran Byzantium dan Kekhalifahan Umayyah II Tahun 772-814 M*. Judul tersebut akan dijabarkan melalui uraian penjelasan dan analisis jawaban dari rumusan masalah. Point 1 mengenai latar belakang kehidupan raja Charlemagne, yang meliputi kehidupan pribadi Raja Charlemagne dan keadaan Kerajaan Franka serta sosial politik Eropa menjelang Charlemagne. Point 2 mengenai manuver politik Charlemagne sehingga Gereja Roma lebih memilih memberikan legitimasi sebagai pewaris sah Kekaisaran Romawi kepada Charlemagne, tidak kepada Kekaisaran Byzantium. Point 3 tentang bentuk konfrontasi Charlemagne terhadap Kekhalifahan Umayyah II yang menjadi sekutu Kekaisaran Byzantium. Point 4 tentang kolaborasi Charlemagne dengan Kekhalifahan Abbasiyah dalam upaya menghadapi Kekaisaran Byzantium dan Kekhalifahan Umayyah II.

Bab V simpulan dan rekomendasi. Bagian ini merupakan akhir skripsi yang di dalamnya terdapat intisari pembahasan secara ringkas dan padat sehingga diperoleh nilai-nilai penting dari judul yang dibahas. Intisari pembahasan ini juga merupakan hasil penelitian dan interpretasi penulis terkait inti dari pembahasan. Adapun rekomendasi akan ditujukan kepada para pengguna hasil penelitian,

kepada yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut dan kepada yang hendak melakukan *follow up* dari hasil penelitian.